

SIARAN PERS

**Rapat Koordinasi Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah -
Reviu Penyerapan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, serta
Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa oleh APIP K/L/P
“APIP KAWAL PENYERAPAN ANGGARAN, PENGADAAN
BARANG/JASA, SERTA
PENYALURAN DANA DESA”**

Rabu, 23 Maret 2016, pk 09.00 -12.00 WIB

Aula Gandhi, Lt 2. BPKP Pusat

Jakarta, 23 Maret 2016 – Rendahnya penyerapan anggaran pada tahun 2015, terutama Belanja Barang dan Belanja Modal berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mengantisipasi hal tersebut terulang di tahun 2016, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk mempercepat *government spending* atau belanja pemerintah terkait penyerapan anggaran dan tender Pra DIPA/DPA tahun 2016. Percepatan penyerapan anggaran diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tinggi yang ditunjukkan dengan tingginya kepercayaan dan minat investasi terhadap Indonesia, serta nilai tukar Rupiah yang stabil.

BPKP sebagai *lead sector* pengawasan intern Pemerintah mengoordinasikan seluruh APIP untuk melakukan Reviu Penyerapan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa, serta Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016. Koordinasi tersebut telah dimulai pada Selasa, (19/1) lalu dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah dengan agenda “Reviu Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran oleh APIP K/L/P”. Pada Rabu (23/3) ini, APIP kembali mengadakan Rakornas dengan tema “Reviu Penyerapan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa, serta Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa”.

Pelaksanaan Reviu Penyerapan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa, serta Penyaluran Dana Desa oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (APIP K/L/P) patut diapresiasi karena dalam waktu yang relatif singkat, menghasilkan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan tender Pra DIPA/Perda APBD bagi Presiden dan pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah. Selanjutnya, peran *early warning* dan *quality assurance* oleh APIP tersebut diharapkan dapat dilanjutkan secara berkesinambungan melalui reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa. Kegiatan reviu tersebut akan dilaksanakan secara berkala setiap tiga bulan (Triwulan) dan *Cut-off* realisasi anggaran adalah setiap akhir Triwulan Tahun Anggaran 2016.

Reviu Penyerapan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa, serta Penyaluran Dana Desa bertujuan untuk mengetahui jumlah anggaran dan realisasi belanja barang, belanja modal dan belanja bansos pada APBN/D per Triwulan; mengetahui jumlah atau posisi Belanja Modal dan Belanja Barang APBN/D Tahun Anggaran 2016 yang telah dilakukan pelelangan, ditetapkan pemenang, ditandatangani kontrak, dan tingkat penyelesaian paket pekerjaan pada setiap akhir Triwulan Tahun Anggaran 2016 pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; mengidentifikasi hambatan dan memberikan solusi/saran perbaikan atas hambatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; serta memonitor dana desa.

Sasaran reviu adalah jumlah anggaran dan realisasi per Triwulan Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial pada APBN/D di masing-masing K/L/P; jumlah, nilai, dan status paket per triwulan atas pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan Belanja Modal dan Belanja Barang pada APBN/D di masing-masing K/L/P. Ruang lingkup reviu adalah Realisasi anggaran (Penyerapan Anggaran) Triwulanan atas Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial; dan Proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Triwulanan yang dibiayai dengan Belanja Modal dan Belanja Barang yang dilakukan melalui pelelangan.

Acara akan dibuka oleh Kepala BPKP dan dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, para Inspektur Jenderal Kementerian, Inspektur Utama Lembaga Non-Kementerian, serta Inspektur dari Pemerintah Daerah. Setelah itu, terdapat diskusi panel yang menghadirkan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Irjen Kementerian Dalam Negeri, Inspektur Provinsi Sulawesi Utara, dan Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Diskusi dimoderatori oleh Inspektur Provinsi Jawa Barat.

Diharapkan dengan adanya koordinasi dan sinergi pengawasan ini, akan terjadi percepatan penyerapan anggaran yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pelayanan publik bagi rakyat Indonesia.

Bagian Humas dan HAL BPKP

Jl.Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120

Tel/Fax: 021-8584985

www.bpkp.go.id, humas@bpkp.go.id

CP: Nuri Sujarwati, 08129556254

Harry Bowo, 08159918047

Sudarsari Sjamsoe, 08164846224